

**SKRIPSI**

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
BANTAENG**

**SRI ENA WASRINI**

**105730485714**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**2019**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA BANTAENG**

**OLEH**

**SRI ENA WASRINI**

**105730485714**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi  
Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Sainuddin dan Jumahari, selaku motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah berhenti mendoakanku dan juga kakak dan adikku yang telah banyak berkorban dan memotivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
2. Dosen-dosenku, terkhusus kedua pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar dalam memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepadaku.
3. Para sahabat dan teman-teman sekalian yang senantiasa selalu memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Aku belajar, aku berjuang dan aku berdoa hingga aku berhasil.  
Terimah kasih semua.

## **MOTTO HIDUP**

Sedikit belajar, sedikit lupa.

**Banyak belajar, banyak lupa. Tidak belajar, tidak lupa.**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng  
Nama Mahasiswa : Sri Ena Wasrini  
No Stambuk/NIM : 105730485714  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

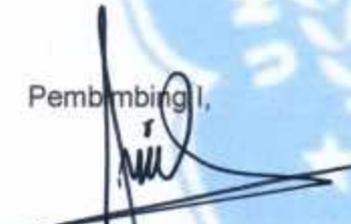
Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu 09 Februari 2019

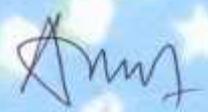
Makassar, 11 Februari 2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Jamaluddin M. SE., M.Si  
NIDN: 2006117201

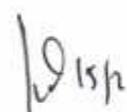
  
Amran, SE., M.Ak.Ak. CA  
NIDN: 0915116902

Diketahui :

Dekan,  
Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Unismuh Makassar,

Ketua,  
Program Studi Akuntansi

  
Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM: 903078

  
Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak.CA.CSP  
NBM: 1073428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

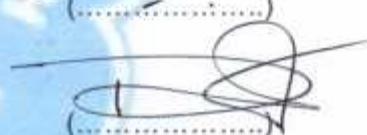
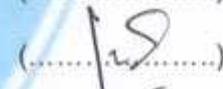
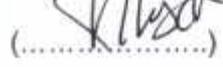
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama **SRI ENA WASRINI, NIM 105730485714**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001 /2019 M, Tanggal 04 Jumadil Akhir 1440 H/ 9 Februari 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

06 Jumadil Akhir 1440 H  
Makassar, \_\_\_\_\_  
11 Februari 2019 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM  
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Ruliaty, MM   
2. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si. Ak   
3. Andi Arman, SE., M.Si. Ak. CA   
4. Naidah, SE., M.Si 

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE., MM**  
**NBM: 903078**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Ena Wasrini

Stambuk : 105730485714

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar. Dan telah diujikan pada tanggal 09 Februari 2019

Makassar, 11 Februari 2019

Yang membuat Pernyataan,



Sri Ena Wasrini

Diketahui Oleh :

Dekan

Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Unismuh Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM: 903078

Ketua,

Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP  
NBM: 1073428

## **ABSTRAK**

**SRI ENA WARSINI**, Tahun 2019, Pengaruh Modernisasi System Admministrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Jamaluddin dan Pembimbing II Amran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan membagi kuesioner kepada 30 responden wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan uji statistik t, nilai t hitung untuk variable modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1)  $3,252 > t$  tabel  $1,699$  dan nilai signifikan  $< 0,05$ , dan nilai t hitung untuk variable kesadaran wajib pajak (X2)  $4,816 > t$  tabel  $1,699$  dan nilai signifikan  $< 0,05$ . Sehingga disimpulkan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

Kata Kunci : Modernisasi System Admministrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak

## ABSTRACT

**SRI ENA WARSANI**, 2019 Year, *The Influence Of The modernization of the tax administration system and the awareness of taxpayers on taxpayer compliance at the pratama bantaeng tax service office*, The Thesis Of The accounting Program Of The Economics And Business Faculty Of University Muhammadiyah Makassar. Guided By Supervisor I Jamaluddin And Supervisor II Amran.

*This study aims to determine the modernization of the tax administration system and the awareness of taxpayers compliance at the pratama bantaeng tax service office. This type of research used is quantitative. Data collectionis was carried out by dividing questionnaires to 30 taxpayer respondets at the pratama bantaeng tax service office. This study used multiple linear regression ana ysis method.*

*The results of this study indicate that, based on stastical test t, the value of arithmetic for for the tax administration variable (X1) 3,525 > t table 1,699 and significant value < 0,05, the t count for the taxpayer awareness variable (X2) 4,816 > 1,699 and significant value < 0,05. So it was concluded that the modernization of the tax administration system and the awareness of taxpayer had a significant effect on taxpayer compliance at the pratama bantaeng service office.*

**Keywords :** *Modernization Of The Tax Administration System Taxpayer Awareness And Taxpayer Compliance*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "*Pengaruh Medernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng*".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayah Sainuddin dan ibu Jumahari yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Jamaluddin M.,SE.,M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Amran, SE.,M.Ak.Ak..CA, selaku Pembimbing II yang telah berkenang membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 terkhusus kelas Ak.6-2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terimah kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya Tulis satu persatu yang telah memberikan semangat. Kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada samua pihak

utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahifii SabililHaq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb*

Makassar, Januari 2019

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK INDONESIA .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT INGGLIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Tinjauan Teori dan Konsep .....	6
1. Definisi Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak.....	7
3. Syarat Pemungutan Pajak .....	7
4. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	9
5. Reformasi Administrasi Perpajakan .....	10
6. Sistem Modernisasi Perpajakan di Indonesia.....	12
7. Konsep dan Tujuan Modernisasi Perpajakan.....	14
8. Kesadaran Wajib Pajak.....	16
9. Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
B. Tinjauan Empiris .....	22
C. Kerangka Konsep.....	25
D. Hipotesis .....	26

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Jenis penelitian .....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
C. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran .....	27
D. Populasi dan Sampel .....	29
E. Teknik Pengmpulan Data .....	30
F. Teknik Analisis .....	30
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	39
B. Deskriptip Responden .....	44
C. Pembahasan.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
3.1	Variabel Penelitian .....	28
3.2	Daftar Skala Likert.....	29
3.3	Responden Menurut Usia.....	37
3.4	Responden Menurut Jenis kelamin .....	37
3.5	Uji Validitas Modernisasi Sistem Administrasi Pajak .....	39
3.6	Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak .....	40
3.7	Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	40
3.8	Uji Reabilitas Modernisasi Sistem Administrasi Pajak .....	48
3.9	Uji Reabilitas Kesadaran Wajib Pajak .....	47
3.10	Uji Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	47
3.11	Modernisasi Sistem Administrasi Pajak (X1) .....	50
3.12	Kesadaran Wajib Pajak (X2) .....	51
3.13	Kepatuhan Wajib Pajak (y).....	52
3.14	Uji Multikolinieritas .....	54
3.15	Coefficients .....	47
3.16	Hasil Koefisien Determinasi .....	59

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Kerangka Konsep.....	26
2.2	Struktur Organisasi .....	34
2.3	Uji Normalitas.....	46
2.4	Uji Heteroskedastisitas.....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan suatu kewajiban warga negara yang berupa iuran wajib terhadap negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan yang utama bagi negara dimana dengan penerimaan pajak ini negara dapat membiayai semua kebutuhan suatu negara. Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam menyusun anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun besarnya kontribusi pajak di dalam APBN pun selalu meningkat setiap tahun. APBN Tahun 2016 sekitar 85% dibiayai dari besarnya penerimaan pajak.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta diperlukannya perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan utama dilakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan penyempurnaan terhadap sistem administrasi perpajakan sehingga dengan penerapannya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan suatu pola sistem administrasi yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai-nilai yang dianut organisasi sehingga diharapkan dapat menjadikan Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) menjadi institusi yang profesional dan memiliki citra baik di masyarakat.

Mulai tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi perpajakan yang secara singkat disebut Modernisasi. Landasarn dari pelaksanaan modernisasi ini adalah *good governance* yaitu penerapan suatu sistem adminitrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan suatu sistem teknologi informasi yang modern dan handal. Menurut Nasucha (2004) terdapat empat diemensi terkait dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu, modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi. Rahayu dan Lingga (2009) menyatakan bahwa modernisasi struktur organisasi merupakan proses penyempurnaan struktur organisasi.

Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran tunggakan.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajiban dalam

bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPH yang diterima oleh kantor pelayanan pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang maupun secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dengan mengambil judul:

**“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah ada pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama bantaeng ?
2. Apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan paja pratama bantaeng?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan akuntansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

## **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian dapat bermanfaat serta dapat memberikan gambaran langsung tentang bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari sudut pandang instansi, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sistem administrasi perpajakan yang diterapkan saat ini guna memberikan pelayanan yang lebih baik di kemudian hari.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori dan Konsep

##### 1. Definisi Pajak

Menurut Soemarso (2011:3)

Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik materi maupun spiritual.

Menurut Abut (2012:2)

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat pada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik *Saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik *Investment*.

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang No. 16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa :

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan. Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Muljono (2010:3) istilah pajak mengandung berbagai pengertian yang hampir sama seperti berikut ini :

- a. Iuran atau kontribusi.

- b. Dari rakyat atau dari Wajib Pajak kepada negara.
- c. Terutang atau Dibayar oleh pribadi atau badan.
- d. Memaksa atau wajib berdasarkan undang-undang.
- e. Tidak mendapat imbalan langsung atau mendapat imbalan tidak langsung.
- f. Untuk keperluan negara atau kemakmuran negara.

## 2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiosmo (2011:1-2), yaitu :

### a. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

### b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Pajak yang tinggi digunakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

## 3. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiosmo (2011:2) :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)  
di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuatu fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

#### 4. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:3-4) teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, antara lain :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus

selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya pemungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan mengeluarkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

## **5. Reformasi Administrasi Perpajakan**

Reformasi perpajakan tidak selalu identik dengan modernisasi perpajakan, terlebih jika modernisasi diartikan dalam pengertian yang sempit, yaitu aplikasi teknologi informasi (TI) yang lebih canggih. Sesuai dengan esensinya merupakan perubahan yang sengaja dilakukan agar sistem administrasi dapat menjadi agen perubahan sosial, dan pertumbuhan ekonomi (Rosdiana dan Irianto, 2011:5).

Menurut Rahayu (2010:28) tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada disuatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia baik itu peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Selain itu juga pengembangan teknologi informasi yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh Wajib Pajak untuk menjawab tantangan globalisasi. Kemudian masalah

perbaikan struktur organisasi instansi pajak, proses dan prosedur administrasi perpajakan, serta sumber daya finansial bagi pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan secara menyeluruh sistem perpajakan dan insentif yang cukup bagi pegawai pajak.

Program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak menurut Rahayu (2010:117-118) adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

1) Meningkatkan Kepatuhan Sukarela

- a) Program kampanye sadar dan peduli pajak.
- b) Program pengembangan pelayanan perpajakan.

2) Memelihara (*maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh

- a) Program pengembangan pelayanan prima.
- b) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.

3) Menangkal Ketidapatuhan Perpajakan (*combatting noncompliance*)

- a) Program merevisi pengenaan sanksi.
- b) Program menyikapi berbagai kelompok Wajib Pajak tidak patuh.
- c) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
- d) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan.
- e) Program penyempurnaan ekstensifikasi.
- f) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan *IT masterplan*.

b. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Administrasi Perpajakan

- 1) Meningkatkan Citra Direktorat Jenderal Pajak
  - a) Program merevisi UU KUP.
  - b) Program penerapan *Good Corporate Governance*.
  - c) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding.
  - d) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan.
- 2) Melanjutkan Pengembangan Administrasi *Large Taxpayer Office (LTO)* atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
  - a) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan menagihan pada LTO.
  - b) Program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada LTO selain BUMN/BUMD.
  - c) Program penerapan sistem administrasi LTO pada kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
  - d) Program penerapan sistem administrasi LTO pada kanwil lainnya.

c. Meningkatkan Produktivitas Aparat Perpajakan

- 1) Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib Pajak.
- 2) Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia.

- 4) Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.
- 5) Program penyusunan rencana kerja operasional.

## **6. Sistem Modernisasi Perpajakan di Indonesia**

Sejak awal dekade 2000, modernisasi telah menjadi salah satu kata kunci yang melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan DJP. Departemen Keuangan. Hal itu dilakukan yang bertujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, demikian juga dengan tuntunan pelayanan yang lebih baik dari *stakeholders* perpajakan. Dengan demikian, diharapkan semua unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPP sebagai unit pelaksanaan teknis/operasional perpajakan, berbenah-benah dalam menyambut, memahami, mengondisikan dan menyesuaikan serta melaksanakan (mengimplementasikan) modernisasi perpajakan sesuai dengan konsep, prinsip, dan sasaran yang sudah ditetapkan di unit masing-masing (pandiangan, 2008:2-3).

Modernisasi administrasi perpajakan Indonesia pada tahun 2002 tersebut ditandai dengan keluarnya keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002 yang membentuk 2 KPP wajib Pajak Besar (*large Taxpayers' Office*) yaitu KPP WP Besar I dan KPP WP Besar II yang berkedudukan di Jakarta. KPP-KPP ini melayani Wajib Pajak-Wajib Pajak terkategori pembayaran pajak terbesar diseluruh Indonesia dan melayani administrasi pajak PPh dan PPN (Widodo dan Djefris, 2008:63).

Setelah itu berturut-turut dikeluarkan keputusan yang melahirkan KPP modern lainnya. Pada tahun 2003 dengan kepmenkeu No. 519/KMK.01/2003 jo. 587/KMK.01.2003 dibentuk 10 KPP khusus yang

juga berkedudukan di Jakarta meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan masuk Bursa. Pada tahun 2004 berdasarkan Kepmenkeu No 254/KMK.01.2004 dibentuk KPP untuk membayar pajak menengah (*Medium Taxpayers Office*) yang kemudian disebut KPP Madya. Selanjutnya dalam kurun waktu 2 tahun sejak 2006 hingga 2008, telah dibentuk sebanyak 357 KPP pembayaran pajak kecil (*small taxpayers office*), yang kemudian disebut KPP Pratama (Widodo dan Djefris, 2008:63).

Sesuatu yang baru kitatemui di KPP modern saat ini adalah keberadaan *Account Representative* (AR). AR adalah jabatan baru yang diperkenalkan dalam struktur organisasi modern DJP RI. AR beradapada seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon) (Widodo dan Djefris, 2008:64).

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Rahayu, 2010:109).

Pandiangan (2008:6) mengemukakan bahwa 3 (tiga) hal yang melatarbelakangi dilakukannya modernisasi perpajakan pada awal decade 2000an, yakni menyangkut :

- a) Citra DJP, yang dinilai harus diperbaiki dan ditingkatkan;
- b) Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan; dan

- c) Integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih harus ditingkatkan.

## 7. Konsep dan Tujuan Modernisasi Perpajakan

Konsep dan tujuan modernisasi menurut Pandiangan (2008:7) adalah sebagai berikut :

### a. Konsep Umum

Modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

- 1) Dalam hal restrukturisasi organisasi, konsepnya adalah:
  - 1) Debirokratisasi,
  - 2) Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan,
  - 3) Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan,
  - 4) Adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola dengan KPP,
  - 5) Adanya "*internal audit*" dan "*customer oriented*" unit, dan
  - 6) Lebih efisien dan "*customer oriented*"
- 2) Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan dengan konsep:
  - a) Berbasis teknologi komunikasi dan informasi,
  - b) Efisien dan "*customer oriented*",
  - c) Sederhana dan mudah dimengerti, dan
  - d) Adanya *built-in control*.
- 3) Penyempurnaan atas system manajemen sumber daya manusia, konsepnya adalah:

- a) Berbasis kompetensi,
- b) Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi,
- c) *Customer driven*, dan
- d) *Continuous improvement*.

b. Tujuan modernisasi perpajakan

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

- 1) Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi;
- 2) Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
- 3) Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

## 8. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Widayati dan Nurlis (2010:5) dalam Simposium Nasional akuntansi XIII di porwokerto, kesadaran merupakan unsur yang ada dalam manusia memahami realita dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas tersebut. Menurut Pandapotan Ritonga (2011:15) dalam artiningsih (2013:13), kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Vanesa dan Hari (2009) yang dikutip oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009:5) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak.

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak didasari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan merugikan negara. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak didasari landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Indikator-indikator dalam kesadaran wajib pajak perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT.
- b. Tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

## **9. Kepatuhan**

### **a. Definisi Kepatuhan**

Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa “pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2010:138), yaitu :

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material juga dapat melibatkan kepatuhan formal.

Menurut Rahayu (2010:140) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penekanan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

#### **b. Kreteria Wajib Pajak patuh**

Dalam KUP pasal 17C menegaskan adanya wajib pajak dengan kreteria tertentu. Kreteria yang dijadikan acuan oleh Menteri yang diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 yang mengatur pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak patuh.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03.2012 pasal. Wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- 2) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan Wajib Pajak Tanpa Pengecualian selama 3(tiga) tahun beerturut-turut; dan
- 3) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

**c. Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 pasal 3 syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh, yaitu :

- 1) Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi :
  - a) Penyampaian surat pemberitahuan tahunan selama 3 (tiga) tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penepatan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu.
  - b) Penyampaian surat pemberitahuan masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penepatan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak januari sampai november tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

- c) Seluruh surat pemberitahuan masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak januari sampai november telah disampaikan, dan
  - d) Surat pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa pajak berikutnya.
- 2) Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- 3) Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasil yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

#### **d. Proses Penetapan wajib Pajak Patuh**

Penetapan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri keuangan RI No.74/PMK.03/2012 pasal 4, yaitu :

- a) Penetapan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan;
- b) Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; dan
- c) Berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan.

#### **e. Pencabutan Wajib Pajak Patuh**

Pencabutan wajib pajak patuh diatur dalam peraturan Menteri Keuangan RI no.74/PMK.03/2012 pasal 11, yaitu :

- 1) Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dicabut penetapannya dalam hal Wajib Pajak:
  - a) Dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan;
  - b) Terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) masa pajak berturut-turut;
  - c) Terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) masa pajak dalam 1 (satu) tahun dekade, atau
  - d) Terlambat menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.
- 2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- 3) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang telah dicabut penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan contoh format sebagaimana

tercantum lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

#### **f. Indikator Kepatuhan Pajak**

Praktik pelaksanaan yang berlangsung saat pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak menurut Simanjuntak dan mukhlis (2012:103) antara lain dapat dilihat dari :

- 1) Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Aspek *income* atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Aspek *law enforcement* (peneraan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
- 4) Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini juga dapat dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Mansyur (2013) dengan judul “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dengan tujuan penelitian :

1. pengaruh reformasi administrasi perpajakan, mencakup aspek struktur organisasi maupun budaya organisasi, terhadap akuntabilitas organisasi.
2. pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. pengaruh akuntabilitas organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengaruh reformasi administrasi perpajakan, dan
4. Akuntabilitas organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu, deskriptif dan inferensial dengan pendekatan kuantitatif.. Dan hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki tanggapan yang sangat bagus terhadap impementasi sistem administrasi perpajakan modern.

Penelitian yang dilakukan oleh Adhitya Febrian Arifin (2015) dengan judul “Pengaruh Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Saksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama” dengan tujuan untuk menawarkan modal untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdiri dari modernisasi sistem perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Metode penelitian yang digunakan yaitu porpositive sampling method, menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis data. Dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan referensi maupun rekomendasi kepada peneliti yang akan dilakukan penelitian tentang pengaruh medernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ita Salsalina Lingga (2013) dengan judul “Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Penguasa Kena Pajak di Wilayah Kpp Pratama “X” Jawa Barat” dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pajak, mengingat bahwa implementasi e-SPT akan mencerminkan seberapa jauh wajib pajak memiliki pemahaman mengenai manfaat dan cara penggunaan e-SPT. Metode penelitian yang digunakan metode pearson correlation dengan bantuan SPSS. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Delli Maria (2013) dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung” penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh modernisasi pada sistem administrasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di kantor pelayanan pajak KPP pratama bandar lampung. Dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikasi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada KPP pratama di kota bandar lampung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dengan arah hubungan positif.

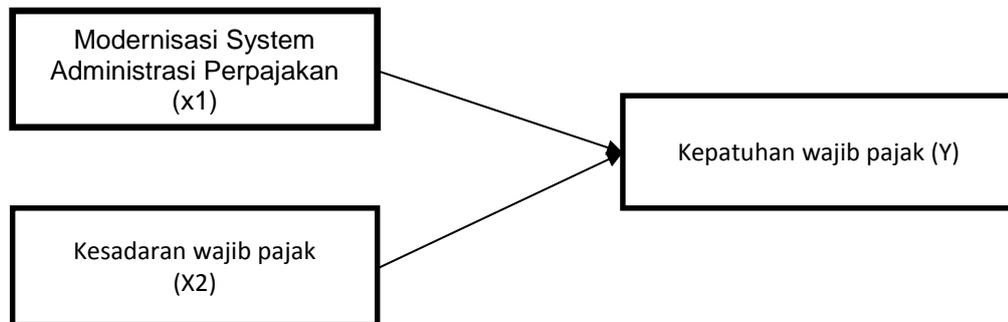
Penelitian yang dilakukan oleh Lasnofa Fasmi dan Fauzan Misra (2014) dengan judul “Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak” tujuan dari penelitian ini menganalisa pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan

pada tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak, khususnya untuk pajak pertambahan nilai (PPN). Penelitian ini menggunakan convenience sampling dengan 39 responden.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuramalia Hasanah dan Susi Indriani (2013) dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Kebon Jeruk 1)” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektifitas pelaksanaan self assessment system dan modernisasi administrasi pajak terhadap kualitas pelayanan pajak KPP kebon jeruk 1 di jakarta barat dimana peneliti memfokuskan sampel peneliti pada wajib pajak pribadi. Metode penelitian ini metode kuantitatif dengan pendekatan regresi. Kesimpulan dari penelitian ini efektifitas pelaksanaan self assessment system dan modernisasi administrasi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pajak.

### **C. Kerangka Konsep**

Sekaran (2011:114) mengemukakan bahwa “kerangka teoretis adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah”



### Kerangka Konsep

#### D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Menurut Sugiyono (2011:69) hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah :

1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama bantaeng.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama bantaeng.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Menurut Sugiyono (2018:8) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan .

Penelitian ini menggunakan penelitian analisis. Menurut Hariwijaya dan Triton (2011:21) penelitian analisis adalah penelitian yang desain risetnya dimulai dari teori dan berakhir pada fakta, oleh karena itu dalam riset ini terlibat satu atau lebih hipotesis.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng, Jalan Andi Mannapiang, Lamalaka, Kec Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415. Dan waktu penelitian kurang lebih dua bulan, yaitu bulan maret-mei 2018.

#### **C. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran**

Variabel independen atau variabel bebas (X) dari penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dan

variabel dependen atau variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 3.1 Variabel penelitian**

Variabel	Dimensi	Indikator
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Struktur Organisasi	a. Sistem pelayanan b. Sebagai pusat analisis dan kebijakan
	<i>Business Process</i> dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	a. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi b. Program pemeriksaan berbasis resiko
	Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia	Kualitas dan kuantitas pegawai
	Pelaksanaan <i>Good Governance</i>	a. Kode etik pegawai b. Tingkat kepercayaan Wajib Pajak
dan Kesadaran Wajib Pajak (X)	Indikator Kesadaran	a. Persepsi wajib pajak b. Penyeluhan Perpajakan c. Karakteristik Wajib Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Indikator kepatuhan	a. Pendaftaran Wajib Pajak b. Penghitungan Pajak c. Pembayaran Pajak d. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) e. Pembukuan

Untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif maka digunakan skala pengukuran berupa skala *likert*. Menurut Sugiyono (2011:93) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dalam skala *likert* untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu diberi skor, misalnya :

**Tabel 3.2 Daftar Skala Likert**

No	Uraian	Skor
1	Sangat setuju/selalu/sangat positif	5
2	Setuju/sering/positif	4
3	Ragu-ragu/kadang-kadang/netral	3
4	Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif	2
5	Sangat tidak setuju/tidak pernah	1

Sumber: Sugiyono (2011:94)

#### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011:81).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling incidental*. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan /insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2011:85).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan dilingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng, Teknik pengambilan sampel wajib pajak yaitu dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak badan yang ditemui di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipercayai dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Sampel dari penelitian ini adalah pegawai Kantor pelayanan pajak pratama bantaeng yang berjumlah 30 orang.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

- 1 Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang di KPP Bantaeng.
- 2 Kuesioner (angket), menurut Hariwijaya dan Triton (2011:61) merupakan alat pengumpulan data yang berupa serangkaian daftar pertanyaan untuk dijawab responden.
- 3 Kuesioner dalam penelitian ini ditunjukkan kepada wajib pajak badan di KPP Pratama Bantaeng.
- 4 Studi kepustakaan, yaitu penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari perpustakaan dengan mengumpulkan data berupa teori yang bersumber dari literatur, buku, dan bahan telisan dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian.

#### **F. Teknik Analisis**

Analisis data menurut Sugiyono (2011:147) merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul,

Analisis data digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel (variabel x variabel Y), sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software statistik* berupa SPSS 20.0 (*Statistik Product and Service Solutions*).

## 1. Uji validitas dan Realibilitas

### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan *valid* jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi antar skor tiap butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Setelah itu menentukan hipotesis,  $H_0$  : skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan total konstruk, dan  $H_a$  : skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan skor total konstruk.

Setelah mengajukan hipotesis kemudian uji dengan membandingkan  $r$  hitung (tabel *corrected item total correlation*) dengan  $r$  tabel (tabel *product moment* dengan signifikan 0,05) untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n - k$ . Suatu kuesioner dikatakan valid apabila  $r$  hitung dan  $r$  tabel bernilai positif (Ghozali, 2011:52).

Jadi uji validitas ingin mengukur apabila pertanyaan dalam kuesioner sudah benar dapat mengukur apa yang hendak kita ukur.

b. Uji realibilitas

Uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2011:47).

Adapun cara yang digunakan untuk menguji realibilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. suatu konstruk atau variabel dikatakan *relibel* jika memberikan nilai *cronbanch Alpha*  $> 0,60$  (Nunnaly dalam Ghozaly, 2011:48).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011:160), metode grafik yang handal adalah dengan melihat *normal probality plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji normalitas data juga dilakukan dengan uji *kolmogorov-smirnov*. Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan secara statistik. Suatu data dinyatakan

berdistribusi normal jika nilai *Asymp sig (2-tailed)* hasil perhitungan *kolmogorov-smirnov* lebih besar dari  $1/2\alpha$  atau 0,05 (Ghozali,2011:161).

b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali,2011:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak *ortogonal*. Variabel *ortogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Kebanyakan data *croossection* mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan SRESID. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi Heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Secara statistik juga dapat dilakukan dengan uji *Glesjer*, yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yan lain. Model regresi yang baik maka tidak terjadi Heteroskedastisitas, jika niali t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (Ghozali,2011:139).

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji t hitung dengan Uji Parsial

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2011).

Rumus uji t sebagai berikut :

$$T_{\text{uji}} = \frac{r \sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Keterangan :

t uji : t hitung

r : koefisien korelasi

n : jumlah sampel

n – 2 : derajat kebebasan

Dalam pengujian hipotesis yang menggunakan uji dua pihak (*two tails*) ini berlaku ketentuan, bahwa bila harga t hitung, berada pada daerah penerimaan  $H_0$  atau terletak diantara harga t tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  di tolak. Dengan demikian bila harga t hitung lebih kecil atau sama dengan ( ) dari harga t tabel maka  $H_0$  diterima. Harga t hitung adalah harga mutlak, jadi tidak dilihat (+) atau (-) nya (sugiyono,2011).

Menurut Duwi Priyanto (2010:69), dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1)  $H_0 : \beta_1 = 0$

Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.

2)  $H_a : \beta \neq 0$

Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel

independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.

b. Uji F Hitung (Uji Parsial)

Menurut Ghozali (2011 : 101), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Salah satu cara melakukan uji F dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung besar daripada nilai F tabel, maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen (ghozali,2011).

Rumus uji F :

$$F = \frac{R^2 N - m - 1}{m (1 - R^2)}$$

Keterangan

N : jumlah subjek

m : jumlah variabel predictor

Menurut (Duwi Priyanto,2010), dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1)  $H_0 : \beta_1, \beta_2, = 0$

Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

$$2) H_a : \beta_1, \beta_2, \neq 0$$

Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

#### 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan pengaruh dua atau lebih variabel *prediktor* (variabel bebas) terhadap satu variabel *kriterium* (variabel terikat) atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau variabel terikat (Y) (usman dan akbar,2006).

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

$b_1, b_2$  : Koefisien regresi linear masing-masing variabel

$X_1$  : Modernisasi Sitem Administrasi Perpajakan

$X_2$  : Kesadaran Wajib Pajak

e : Standar kesalahan

#### 5. koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi  $R^2$  pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model (ikatan, empati, timbal balik, dan kepercayaan) dalam menerangkan variasi variabel dependen / terikat (kepuasan pelanggan). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai  $R^2$

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (ghozali, 2011:97).

Kelemahan mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi adalah jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted*  $R^2$  pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti nilai  $R^2$ , nilai *Adjusted*  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

## **BAB IV**

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Nama dan Sejarah Singkat Instansi**

Kantor pelayanan pajak Pratama merupakan langkah repormasi birokrasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan menggabungkan 3 Kantor Pelayanan, antara lain adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng pertama kali terbentuk dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa KPP Pratama Bantaeng merupakan salah satu dari 15 Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-95/PJ/2008 tentang penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussala dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, penyuluhan dan konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Kpp Pratama Bantaeng mulai beroperasi pada tanggal 27 Mei 2008. KPP Pratama Bantaeng berkedudukan di jalan Andi Mannapiang Kabupaten Bantaeng, menggunakan gedung bekas

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bantaeng.

**A. Visi dan Misi**

2. Visi KPP Pratama Bantaeng

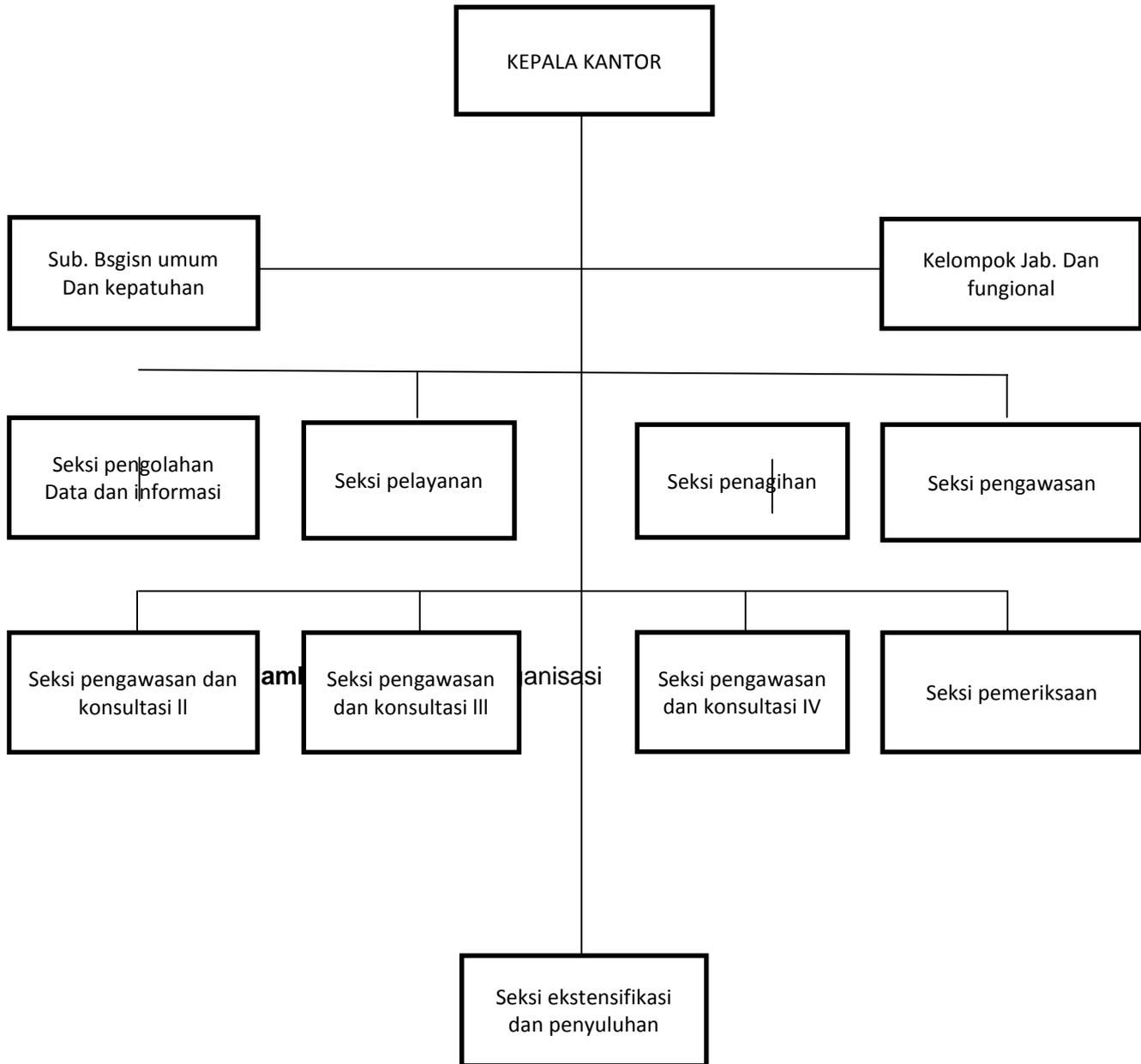
Menjadi Institusi penghimpunan penerimaan negara terbaik dan dapat dipercaya di Tana Mangkasara'

3. Misi KPP Pratama Bantaeng

Memberi layanan prima, mengawasi kepatuhan perpajakn dan mengamankan penerimaan negara

**B. Struktur Organisasi dan Job Description**

1. Struktur Organisasi



## 2. Job Description

Dalam menjalankan fungsinya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng memiliki II unit organisasi yang memiliki tugas antara lain :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian internal, pemantauan pengendalian resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etika dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- b. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi  
Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi, serta pengelolaan kinerja organisasi.
- c. Seksi Pelayanan  
Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
- d. Seksi Penagihan  
Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak, penagihan pajak, usulan penghapusan piutang pajak, penyitaan dan penyenderaan, serta penyimpanan dokumen penagihan.

e. Seksi Penerimaan

Seksi Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluhan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksaa Pajak yang ditunjuk Kepala Kantor.

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas dan melakukan pengamatan petensi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemuktahiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru, serta penyuluhan perpajakan. Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan memiliki banyak fungsi termasuk fungsi pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi pengawasan dan konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III,

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV,

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III,

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV,

Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan

Wajib pajak , rekonsiliasasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan identifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

## B. Deskriptif Responden

Sebelum melakukan dalam penelitian ini lebih dahulu dikemukakan gambaran karakteristik responden yang digunakan untuk melengkapi penelitian meliputi jenis kelamin, usia, dan apakah benar salah satu wajib pajak badan yang ditemui di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang ditemui di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. Adapun uraian gambaran umum responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Karakteristik Responden menurut Usia

Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

<b>Usia</b>		
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
20 – 30 Tahun	10	33,3%
30 – 40 Tahun	13	43,3%
40 >	7	23,4%
Total	30	100%

**Sumber : data diolah juni 2018**

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa responden berusia 30-40 tahun paling banyak yaitu sebesar 40,3 %, sedangkan yang paling sedikit adalah responden berumur 40 > tahun yaitu sebesar 23,4%.

## 2. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.2**

<b>Jenis Kelamin</b>		
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Laki-Laki	18	54%
Perempuan	12	36%
Total	30	100%

**Sumber : data diolah juni 2018**

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa responden jenis kelamin laki-laki paling banyak yaitu sebesar 54 %, sedangkan yang paling sedikit adalah responden jenis kelamin perempuan yaitu sebesar 36 %.

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi produk moment, kriteria yang digunakan dalam menentukan valid atau tidaknya pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a.  $(a, n-2)$  dari tabel produk moment  $a = 5\%$  dan  $n = 30$
- b. Jumlah responden sebanyak 30 responden untuk di uji
- c.  $r$  hitung (tabel *corrected item total correlation*)  $>$   $r$  tabel (tabel *product moment*) atau bernilai positif maka data dikatakan valid.

Uji validitas akan menguji masing-masing variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil uji validitas dari modernisasi system administrasi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama bantaeng dengan sampel 30 responden.

a. Variabel Modernisasi System Administrasi Pajak

**Tabel 4.3**

**Hasil Uji Validiitas Modernisasi System Administrasi Pajak**

<b>Pernyataan</b>	<b>r hitung</b>	<b>r tabel</b>	<b>keterangan</b>
X1.1	0,549	0,374	Valid
X1.2	0,657	0,374	Valid
X1.3	0,623	0,374	Valid
X1.4	0,603	0,374	Valid
X1.5	0,765	0,374	Valid
X1.6	0,475	0,374	Valid
X1.7	0,685	0,374	Valid

**Sumber : data diolah dari (SPSS 24), Agustus 2018**

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel modernisasi system administrasi pajak memiliki kriteria valid untuk semua item pernyataan berdasarkan kriteria r hitung lebih besar dari r tabel 0,374.

## b. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

**Tabel 4.4****Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak**

<b>Pernyataan</b>	<b>r hitung</b>	<b>r tabel</b>	<b>Keterangan</b>
X2.1	0,549	0,374	Valid
X2.2	0,701	0,374	Valid
X2.3	0,699	0,374	Valid
X2.4	0,704	0,374	Valid
X2.5	0,728	0,374	Valid

**Sumber : data diolah dari (SPSS 24), Agustus 2018**

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki kriteria valid untuk semua item pernyataan berdasarkan kriteria r hitung lebih besar dari r tabel 0,374.

## c. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

**Tabel 4.5****Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**

<b>Pertanyaan</b>	<b>r hitung</b>	<b>r tabel</b>	<b>Keterangan</b>
Y1	0,631	0,374	Valid
Y2	0,661	0,374	Valid
Y3	0,640	0,374	Valid
Y4	0,671	0,374	Valid
Y5	0,752	0,374	Valid
Y6	0,622	0,374	Valid

**Sumber : data diolah dari (SPSS 24), Agustus 2018**

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki kriteria valid untuk semua item pernyataan berdasarkan kriteria r hitung lebih besar dari r tabel 0,374.

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:47). SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau validitas dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$  (Nunaly, 1994 dalam Ghozali, 2011:48). Perhitungan koefisien *Cronbach's Alpha* dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS versi 22.

### a. Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

**Tabel 4.6**

#### **Hasil Uji Reliabilitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Variabel	Cronbach's Alpha	N Of Items	keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,738	7	Reliabel

**Sumber : data diolah dari (SPSS 24), Agustus 2018**

Tabel 4.6 menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 0,738. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini tidak reliabel karena mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih kecil dari 0,60.

## b. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

**Tabel 4.7****Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak**

Variabel	Cronbach's Alpha	N Of Items	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,701	5	Reliabel

**Sumber : data diolah dari (SPSS 24), Agustus 2018**

Tabel 4.7 menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,701. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

## c. Variabel Keepatuhan Wajib Pajak

**Tabel 4.8****Hasil Uji Reliabilitas Keepatuhan Wajib Pajak**

Variabel	Cronbach's Alpha	N Of Items	keterangan
Keepatuhan Wajib Pajak	0,663	6	Reliabel

**Sumber : data diolah dari (SPSS 24), Agustus 2018**

Tabel 4.8 menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel Keepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,663. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

## 3. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data berdasarkan atas hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap

masing-masing indikator pengukur variabel. Statistik deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)

Dalam penelitian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1), ini digunakan 7 butir pernyataan untuk mengukur, yaitu :

**Tabel 4.9**

No	Pernyataan	Jumlah Responden										Rata-rata
		SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)		
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X1.1	13	43,3	16	53,3	1	3,3	0	0,0	0	0,0	4,40
2	X1.2	15	50,0	14	46,7	1	3,3	0	0,0	0	0,0	4,47
3	X1.3	11	36,7	19	63,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4,37
4	X1.4	14	46,7	15	50,0	1	3,3	0	0,0	0	0,0	4,43
5	X1.5	11	36,7	18	60,0	1	3,3	0	0,0	0	0,0	4,33
6	X1.6	12	40,0	18	60,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4,40
7	X1.7	11	36,7	18	60,0	1	3,3	0	0,0	0	0,0	4,33
Total Rata-Rata : 30,73												

**Sumber : data diolah dari (SPSS 24), Agustus 2018**

Berdasarkan tabel 4.9 diatas tentang jawaban responden mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat diketahui bahwa nilai mean variabel peran pengawasan 30,73. Pernyataan yang memberikan nilai rata-rata terbesar adalah pada pernyataan X1.2 dengan nilai rata-rata 4,47. Sedangkan pernyataan yang memberikan nilai rata-rata terendah adalah pada pernyataan X1.4 dan X1.7 dengan nilai rata-rata sebesar 4,33.

b. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Dalam penelitian Kesadaran Wajib Pajak (X2), ini digunakan 5 butir pernyataan untuk mengukur, yaitu :

**Tabel 4.10**

No	Pernyataan	Jumlah Responden										Rat a- rata
		SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)		
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X2.1	12	40,0	17	56,7	1	3,3	0	0,0	0	0,0	4,37
2	X2.2	15	50,0	14	46,7	1	3,3	0	0,0	0	0,0	4,47
3	X2.3	11	36,7	19	63,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4,37
4	X2.4	14	46,7	15	50,0	1	3,3	0	0,0	0	0,0	4,43
5	X2.5	11	36,7	18	60,0	1	3,3	0	0,0	0	0,0	4,33
Total Rata-Rata : 26,34												

**Sumber : data diolah dari (SPSS 24), Agustus 2018**

Berdasarkan tabel 4.10 diatas tentang jawaban responden mengenai kesadaran wajib pajak dapat diketahui bahwa nilai mean variabel peran pengawasan 26,34. Pernyataan yang memberikan nilai rata-rata terbesar adalah pada pernyataan X2.2 dengan nilai rata-rata 4,47. Sedangkan pernyataan yang meberikan nilai rata-rata terendah adalah pada pernyataan X2.5 dengan nilai rata-rata sebesar 4,33.

c. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dalam penelitian Kepatuhan Wajib Pajak (X2), ini digunakan 6 butir pernyataan untuk mengukur, yaitu :

Tabel 4.11

No	Pernyataan	Jumlah Responden										Rat a- rata
		SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)		
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Y1	9	30,0	18	60,0	3	10,, 0	0	0,0	0	0,0	4,20
2	Y2	15	50,0	14	36,7	1	3,3	0	0,0	1	2,0	4,47
3	Y3	11	36,7	19	63,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4,37
4	X4	14	46,7	15	50,0	1	3,3	0	0,0	0	0,0	4,43
5	Y5	11	36,7	18	60,0	1	3,3	0	0,0	0	0,0	4,33
6	Y6	12	40,0	18	60,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4,40
Total Rata-Rata : 26,2												

**Sumber : data diolah dari (SPSS 24), Agustus 2018**

Berdasarkan tabel 4.11 diatas tentang jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak dapat diketahui bahwa nilai mean variabel peran pengawasan 26,2. Pernyataan yang memberikan nilai rata-rata terbesar adalah pada pernyataan Y2 dengan nilai rata-rata 4,47. Sedangkan pernyataan yang meberikan nilai rata-rata terendah adalah pada pernyataan Y5 dengan nilai rata-rata sebesar 4,33.

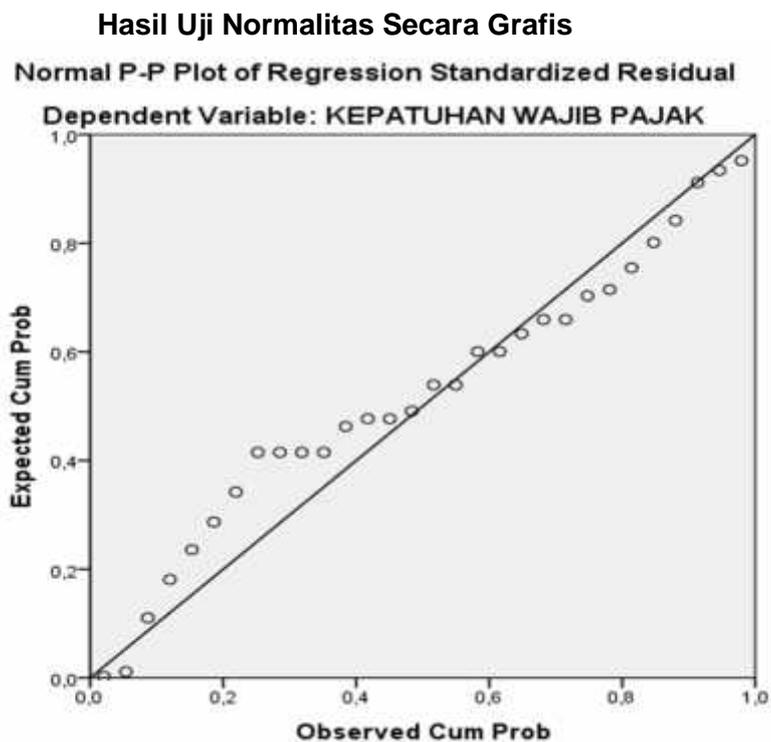
#### 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

##### a. Hasil Uji Norrmalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji normalitas terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan

analisis grafis. Uji normalitas data dengan menggunakan pengolahan SPSS 24 untuk menghasilkan grafik tersebut

**Gambar 4.2**



**Sumber : data diolah dari (SPSS 24), Agustus 2018**

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah dengan garis diagonal menandakan bahwa model asumsi regresi memenuhi asumsi normalitas dan model regresi layak untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel bebas (modernisasi system administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak).

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Untuk uji multikolinearitas diperlukan untuk memperoleh korelasi yang sebenarnya, yang murni tidak dipengaruhi variabel-variabel lain yang mungkin terjadi saja berpengaruh.

**Tabel 4.12**

**Hasil Uji Multikolineritas**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,149	6,695
	X2	,149	6,695
a. Dependent Variable: kepuasan pelanggan			

**Sumber : data diolah dari (SPSS 24), Agustus 201**

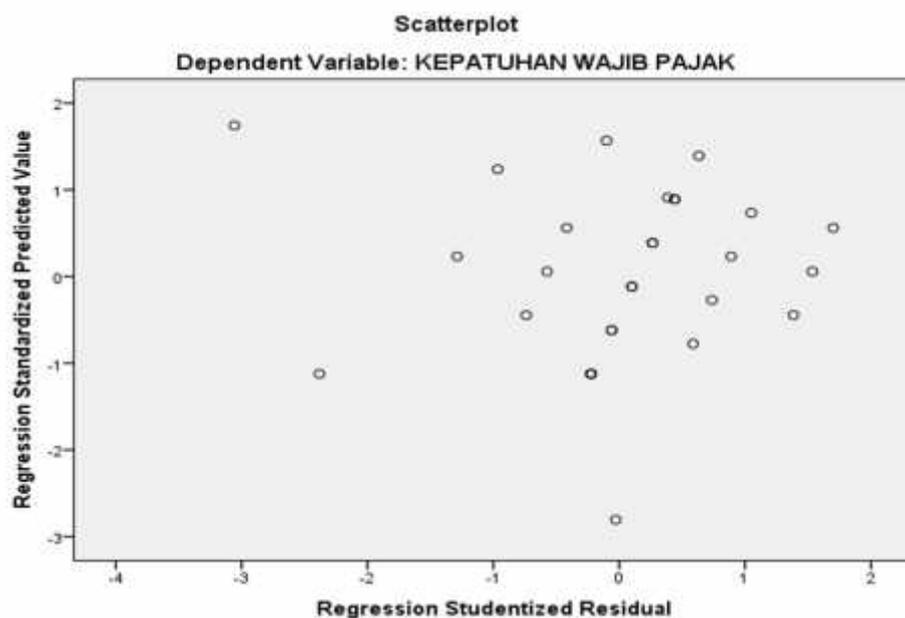
Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dari hasil uji *Variance Inflation Factor (VIF)* pada hasil output SPSS.24, tabel *coefficient*, masing-masing variabel independen memiliki VIP dari < 10 yaitu untuk variabel modernisasi system administrasi perpajakan 6,695, variabel kesadaran wajib pajak sebesar 6,965 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan nilai *Tolerance* > 0,10 yaitu untuk variabel kualitas pelayanan 0,149 dan untuk variabel harga 0,149. Maka dapat dinyatakan model regresi linear berganda tidak terdapat multikolinearitas antara variabel dependen dengan variabel independen yang lain sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan yang lain. Pada heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah secara grafik.

**Gambar 4.3**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas Secara Grafis**



**Sumber : data diolah dari (SPSS 24), Agustus 2018**

Dari grafik *scatterplot* yang ada pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2011:107).

## 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian persyaratan analisis klasik dasar regresi yang telah dilakukan sebelumnya memberikan hasil bahwa variabel-variabel yang terlibat didalamnya memenuhi kualifikasi persyaratan dan asumsi klasik tersebut. Penelitian ini dilanjutkan dengan melakukan pengujian signifikan model dan interpretasi model regresi.

**Tabel 4.13**

**Coefficients<sup>a</sup>**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,059	1,170		2,613	,001
	MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	,319	,098	,398	3,252	,000
	KESADARAN WAJIB PAJAK	,605	,126	,590	4,816	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

**Sumber : data diolah dari (SPSS 24), April 2018**

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi

dias dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 3,059 + -0,319 X1 + -0,605 X2 + e$$

Dimana :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X1 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

X2 : Kesadaran Wajib Pajak

## 6. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut :

### a. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pada tabel Uji t diatas untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

- 1) Pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Pada tabel 4.9 nilai t hitung untuk modernisasi system administrasi perpajakan sebesar 3,252 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,699. Maka dapat disimpulkan t hitung  $3,252 > t$  tabel 1,699 dan nilai signifikan 0,000 lebih besar dari 0,05. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh yang signifikan antara modernisasi system administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di terima ( $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak), artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara modernisasi system administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak).

- 2) Pengaruh variabel kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Pada tabel 4.9 nilai  $t$  hitung harga sebesar 4,816 sedangkan nilai  $t$  tabel 1,699. Maka dapat disimpulkan  $t$  hitung  $4,816 > t$  tabel 1,699 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima ( $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak), artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 7. Hasil koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen (modernisasi system administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memproduksi variabel dependen (Ghozali,97:2011).

**Table 4.14**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,969 <sup>a</sup>	,940	,935	,483
a. Predictors : (constant), pengembangan system kredit				

**Sumber : data diolah dari (SPSS 24), April 2018**

Dari koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) menunjukkan 93,5 % variasi pada variabel kepatuhan wajib pajak mampu diterangkan

oleh kedua variabel bebas (modernisasi system administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak), sedangkan sisanya yang sebesar 6,5 % diterangkan oleh variabel lain diluar model ini.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, maka dapat dihasilkan penelitian sebagai berikut :

1. Pengaruh Modernisasi System Administrasi Perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan uji dari tabel koefisien uji statistik t, nilai t hitung untuk variabel Modernisasi System Administrasi Perpajakan (X1) adalah sebesar 3,525 sedangkan t tabel 1,699. Maka dapat diketahui t hitung > t tabel. Dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Modernisasi System Administrasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Adhitya Febrian Arifin (2015) dengan judul "Pengaruh Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Saksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama yang menyatakan modernisasi system administrasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hal ini berarti kantor pelayanan pajak pratama bantaeng harus lebih meningkatkan dan mensosialisasikan agar lebih banyak mengenal

modernisasi system administrasi perpajakan bila ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama bantaeng

Senada dengan pendapat yang dijelaskan pada bab sebelumnya, yang mengatakan bahwa Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Rahayu, 2010:109).

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan dari tabel koefisien uji statistik t, nilai t hitung untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) adalah sebesar 4,816 sedangkan t tabel 1,699. Maka dapat diketahui t hitung > t tabel, dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. di kantor pelayanan pajak pratama bantaeng

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Adhitya Febrian Arifin (2015) dengan judul "Pengaruh Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Saksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang diartikan bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun untuk pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Senada dengan teori yang dijelaskan pada bab sebelumnya, kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku Pandapotan Ritonga (2011:15) dalam artiningsih (2013:13).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang didapatkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan uji dari tabel koefisien uji statistik t, nilai t hitung untuk variabel Modernisasi System Administrasi Perpajakan (X1) adalah sebesar 3,525 sedangkan t tabel 1,699. Maka dapat diketahui t hitung > t tabel. Dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Modernisasi System Administrasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Berdasarkan dari tabel koefisien uji statistik t, nilai t hitung untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) adalah sebesar 4,816 sedangkan t tabel 1,699. Maka dapat diketahui t hitung > t tabel, dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. dikantor pelayanan pajak pratama bantaeng.

#### **B. Saran**

Meskipun peneliti telah menyusun dengan sebaik-baiknya tetapi masih saja banyak kekurangan dalam penelitian ini dengan segala keterbatasannya. Berikut adalah saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian :

## 1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

- a. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka saran yang dapat disampaikan kepada kantor pelayanan pajak pratama bantaeng untuk modernisasi system administrasi perpajakan harus selalu meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan pelayan prima kepada wajib pajak, sehingga diharapkan apabila kinerja aparat perpajakan semakin meningkat, maka penerimaan pajak juga meningkat juga.
- b. Dari hasil hasil penelitian ini dapat diketahui kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis kepada wajib pajak harus bias memahami tentang perpajakan dan mamatuhi undang-undang perpajakan seperti sanksi perpajakan wajib pajak juga harus menyadari bahwa pajak itu digunakan untuk kepentingan berrsama sehingga wajib pajak menjadi lebih taat dalam membayar. Maka dalam ini kantor pelayanan pajak pratama bantaeng harus mampu menjaling hubungan yang baik dengan wajib pajak salah satunya meningkatkan kualitas pelayanan. Jika kualitas pelayanan baik maka wajib pajak akan merasa nyaman. Hal ini sangat mmembantu meningkatkan wajib pajak dari kepatuhan wajib pajak.

2. Untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian berikutnya tidak sebatas kualitas pelayanan dan harga tetapi juga menambahkan variabel lain pada penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Adhitya Febrian. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review*. Vol. 1.
- Artiningsih. (2010). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama sleman". *Skripsi*. Program Studi Akuntansi-S1 Universitas Negeri Yogyakarta.
- Delli Maria. (2013). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*. Vol. 01.
- Hariwijaya & Triton. 2011. *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Oryza.
- Hadi mansyur. (2013). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*. Vol. 04.
- Lasnofa Fasmi & Fauzan Misra. (2014). Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak : Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama "X" Jawa Barat I. *Jurnal akuntansi*. Vol.1.
- Lingga, Ita Salsalina. (2013). Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak : Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama "X" Jawa Barat I. *Jurnal akuntansi*. Vol.1.
- Muljono. 2010. *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Muliari & Setiawan. (2011). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review*. Vol. 1.
- Nurmalia Hasana & Suri Indriani. (2013). Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Pelayanan Pajak (Studi Kasus Pada KKP Kebon Jeruk I). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 8.
- Pandiangan 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosdiana & Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.
- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Simanjuntak & Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sekaran. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga. (2009). "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")". *Jurnal Akuntansi*, vol. 1.
- Soemarso. 2011. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tiraada. (2013). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review*. Vol. 1.
- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hadi Adi. (2009). "Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar". *Makalah*. Simposium Nasional Perpajakan II.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Widodo & Djefri. 2008. *Tax Payer's Rights Apa yang Perlu Kita Ketahui tentang Hak-hak Wajib Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Widayati dan Nurlis. (2010). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KKP Pratama Gembira Tiga)". *Jurnal*. Publikasi SNA XIII Purwokerto.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### KUESIONER

Kepada

Bapak/Ibu Responden

KPP Pratama Bantaeng

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa program studi Akuntansi (S1) universitas Muhammadiyah Makassar, saya akan melakukan penelitian tentang **“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG”** Untuk keperluan tersebut saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan saya mohon kesediaanya untuk mengisi kuesioner yang disediakan dengan kejujuran.

Demikian permohonan atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

**Sri Ena Warsini**

### Data Responden

Berikan tanda (√) sesuai dengan data diri anda :

- Apakah memiliki NPWP =  Ya  Tidak
- Jenis Kelamin =  L  P
- Usia =  25-35 Thn  46-55 Thn >  Thn
- Jenis Pekerjaan =  Tidak Bekerja  PNS  Karyawan swasta  Pegawai BUMN  wirausaha  
 Lainnya mohon disebutkan (.....)
- Tingkat Pendidikan =  SMA  S1  S2  lainnya

Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda (√) pada kontak yang sesuai berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

SS = Sangat setuju

### A. MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

NO	KETERANGAN	STS	TS	KS	S	SS
1.	Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada wajib pajak, petugas memberikan informasi/penjelasan secara lengkap sehingga wajib pajak dapat mengerti dengan baik.					
2.	Adanya <i>Account Representative</i> benar-benar melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu membimbing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.					
3.	Kemudahan pelayanan dengan adanya <i>account representative</i> yang melayani dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya.					
4.	System administrasi modern (digitalisasi : e-SPT, e-filling) sudah benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.					
5.	Pembayaran secara online (tellerbank, internet banking,ATM) memudahkan wajib pajak karena prosesnya cepat					
6.	System pelaporan pajak secara eletronik dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak.					
7.	Apparat pajak mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak mengenai perpajakan					

### B. KESADARAN WAJIB PAJAK

NO	KETERANGAN	STS	TS	KS	S	SS
1.	Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.					
2.	Kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu.					
3.	Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain.					
4.	Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan adalah kewajiban.					
5.	Kesadaran wajib pajak bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sarana politik.					

### C. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

NO	KETERANGAN	STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP (kantor pelayanan pajak)					
2.	Saya selalu mengisi SPT (surat pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu.					
3.	Saya menyampaikan SPT ke kantor pajak tepat waktu sbelum batas akhir penyampaian SPT.					
4.	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya dengan tepat waktu.					
5.	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					
6.	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.					

# HASIL UJI SPSS

## UJI VALIDITAS X1

### Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	JUMLAH
X1.1 Pearson Correlation	1	,257	,075	,302	,336	,270	,112	,549**
Sig. (2-tailed)		,170	,694	,105	,069	,149	,556	,002
N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.2 Pearson Correlation	,257	1	,599**	,205	,368*	,048	,368*	,657**
Sig. (2-tailed)	,170		,000	,276	,045	,799	,045	,000
N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.3 Pearson Correlation	,075	,599**	1	,400*	,429*	-,056	,300	,623**
Sig. (2-tailed)	,694	,000		,028	,018	,767	,107	,000
N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.4 Pearson Correlation	,302	,205	,400*	1	,407*	,097	,185	,603**
Sig. (2-tailed)	,105	,276	,028		,026	,609	,328	,000
N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.5 Pearson Correlation	,336	,368*	,429*	,407*	1	,253	,538**	,765**
Sig. (2-tailed)	,069	,045	,018	,026		,177	,002	,000
N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.6 Pearson Correlation	,270	,048	-,056	,097	,253	1	,506**	,475**
Sig. (2-tailed)	,149	,799	,767	,609	,177		,004	,008
N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.7 Pearson Correlation	,112	,368*	,300	,185	,538**	,506**	1	,685**
Sig. (2-tailed)	,556	,045	,107	,328	,002	,004		,000
N	30	30	30	30	30	30	30	30
JUM LAH Pearson Correlation	,549**	,657**	,623**	,603**	,765**	,475**	,685**	1
Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,000	,000	,008	,000	
N	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## HASIL UJI VALIDITAS X2

**Correlations**

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	JUMLAH
X2.1	Pearson Correlation	1	,203	-,004	,353	,265	,549**
	Sig. (2-tailed)		,283	,982	,056	,158	,002
	N	30	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	,203	1	,599**	,205	,368*	,701**
	Sig. (2-tailed)	,283		,000	,276	,045	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	-,004	,599**	1	,400*	,429*	,699**
	Sig. (2-tailed)	,982	,000		,028	,018	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	,353	,205	,400*	1	,407*	,704**
	Sig. (2-tailed)	,056	,276	,028		,026	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	,265	,368*	,429*	,407*	1	,728**
	Sig. (2-tailed)	,158	,045	,018	,026		,000
	N	30	30	30	30	30	30
JUMLAH	Pearson Correlation	,549**	,701**	,699**	,704**	,728**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## HASIL UJI VALIDITAS Y

**Correlations**

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	JUMLAH
Y1	Pearson Correlation	,132	,320	,538	,239	,303	,059	,631**
	Sig. (2-tailed)		,217	,466	,463	,587	,402	,074
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y2	Pearson Correlation	,020	1	,599**	,205	,368*	,048	,661**
	Sig. (2-tailed)	,917		,000	,276	,045	,799	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y3	Pearson Correlation	-,138	,599**	1	,400*	,429*	-,056	,640**
	Sig. (2-tailed)		,217		,028	,026		,074
	N	30	30	30	30	30	30	30

	Sig. (2-tailed)	,466	,000		,028	,018	,767	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y4	Pearson Correlation	,139	,205	,400*	1	,407*	,097	,671**
	Sig. (2-tailed)	,463	,276	,028		,026	,609	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y5	Pearson Correlation	,103	,368*	,429*	,407*	1	,253	,752**
	Sig. (2-tailed)	,587	,045	,018	,026		,177	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y6	Pearson Correlation	,559	,348	,456	,397	,053	1	,622**
	Sig. (2-tailed)	,402	,799	,767	,609	,177		,082
	N	30	30	30	30	30	30	30
JUM LAH	Pearson Correlation	,331	,661**	,640**	,671**	,752**	,322	1
	Sig. (2-tailed)	,074	,000	,000	,000	,000	,082	
	N	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### HASIL UJI RELIABELITAS X1

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,738	7

#### HASIL UJI RELIABELITAS X2

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,701	5

## HASIL UJI RELIABELITAS Y

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,663	6

## HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,969 <sup>a</sup>	,940	,935	,483	,940	209,708	2	27	,000

a. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	97,866	2	48,933	209,708	,000 <sup>b</sup>
	Residual	6,300	27	,233		
	Total	104,167	29			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

### Coefficients<sup>a</sup>

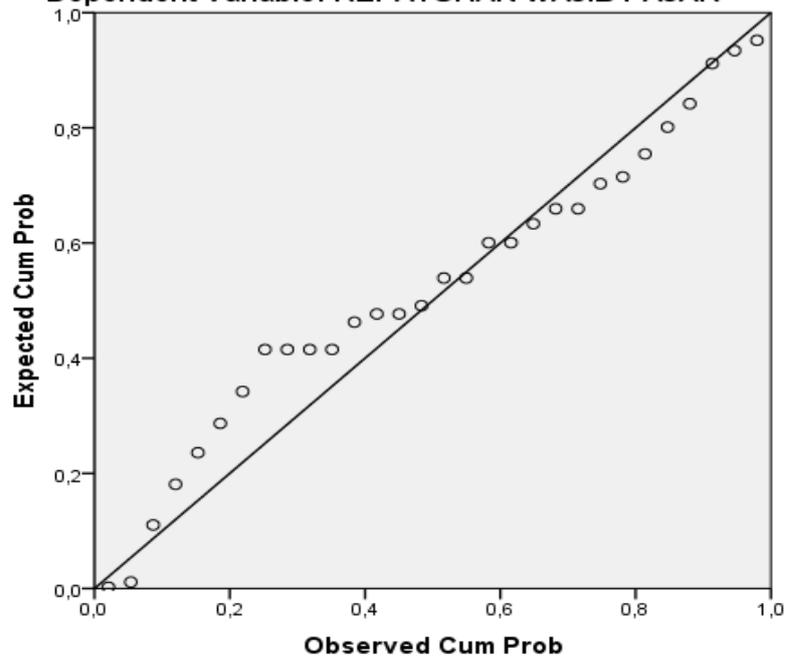
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,059	1,170		2,613	,001					
	MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	,319	,098	,398	3,252	,000	,942	,530	,154	,149	6,695
	KESADARAN WAJIB PAJAK	,605	,126	,590	4,816	,000	,957	,680	,228	,149	6,695

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## HASIL UJI NORMALITAS

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

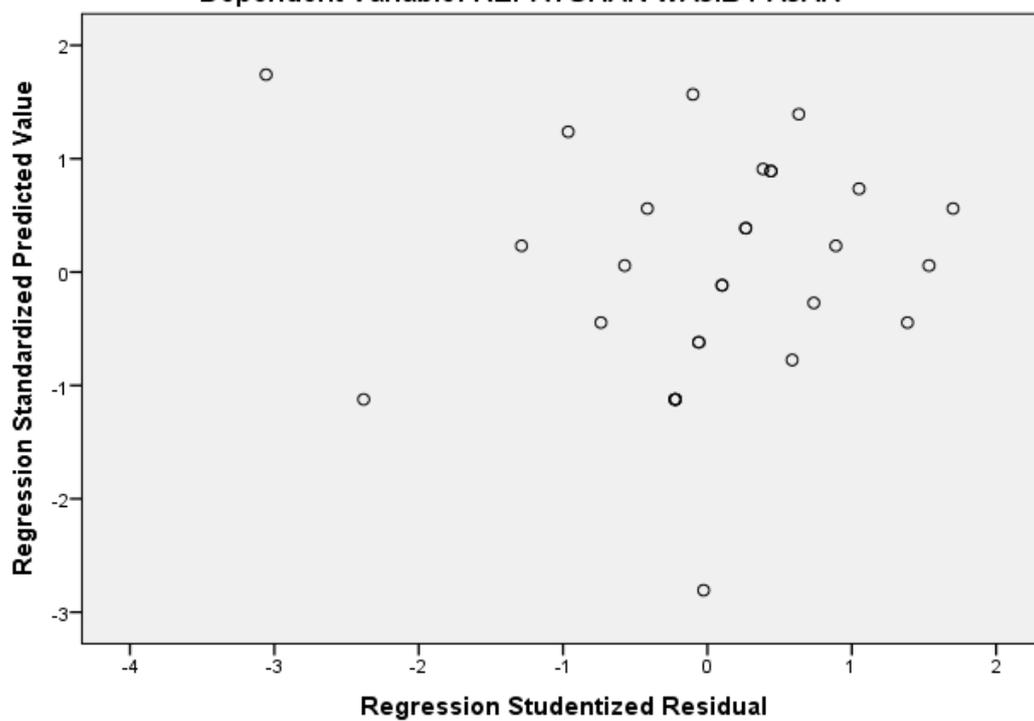
Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK



### HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Scatterplot

Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK



## HASIL UJI ANALISIS DESKRIPTIF RESPONDEN

### Statistics

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7
N	Valid	30	30	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4,40	4,47	4,37	4,43	4,33	4,40	4,33

### X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3,3	3,3	3,3
	4	16	53,3	53,3	56,7
	5	13	43,3	43,3	100,0
Total		30	100,0	100,0	

### X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3,3	3,3	3,3
	4	14	46,7	46,7	50,0
	5	15	50,0	50,0	100,0
Total		30	100,0	100,0	

### X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	19	63,3	63,3	63,3
	5	11	36,7	36,7	100,0
Total		30	100,0	100,0	

### X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3,3	3,3	3,3
	4	15	50,0	50,0	53,3
	5	14	46,7	46,7	100,0
Total		30	100,0	100,0	

**X1.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3,3	3,3	3,3
	4	18	60,0	60,0	63,3
	5	11	36,7	36,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

**X1.6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	18	60,0	60,0	60,0
	5	12	40,0	40,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

**X1.7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3,3	3,3	3,3
	4	18	60,0	60,0	63,3
	5	11	36,7	36,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

**Statistics**

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
N	Valid	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4,37	4,47	4,37	4,43	4,33

**X2.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3,3	3,3	3,3
	4	17	56,7	56,7	60,0
	5	12	40,0	40,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

**X2.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3,3	3,3	3,3
	4	14	46,7	46,7	50,0
	5	15	50,0	50,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

**X2.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	19	63,3	63,3	63,3
	5	11	36,7	36,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

**X2.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3,3	3,3	3,3
	4	15	50,0	50,0	53,3
	5	14	46,7	46,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

**X2.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3,3	3,3	3,3
	4	18	60,0	60,0	63,3
	5	11	36,7	36,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

**Statistics**

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
N	Valid	30	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0	0
	Mean	4,20	4,47	4,37	4,43	4,33	4,40

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	3	10,0	10,0	10,0
	4	18	60,0	60,0	70,0
	5	9	30,0	30,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

**Y2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3,3	3,3	3,3
	4	14	46,7	46,7	50,0
	5	15	50,0	50,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

**Y3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	19	63,3	63,3	63,3
	5	11	36,7	36,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

**Y4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3,3	3,3	3,3
	4	15	50,0	50,0	53,3
	5	14	46,7	46,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

**Y5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3,3	3,3	3,3
	4	18	60,0	60,0	63,3
	5	11	36,7	36,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

**Y6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	18	60,0	60,0	60,0
	5	12	40,0	40,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

NO	X1,1	X1,2	X1,3	X1,4	X1,5	X1,6	X1,7	JML
1	5	4	4	5	4	5	4	31
2	5	5	4	4	4	4	4	30
3	4	5	4	4	4	5	5	31
4	4	5	5	4	5	5	5	33
5	5	5	5	5	4	4	4	32
6	5	4	4	5	4	5	4	31
7	4	5	4	4	4	4	4	29
8	5	5	4	4	4	5	5	32
9	5	5	5	4	5	5	5	34
10	4	5	5	5	4	4	4	31
11	4	5	5	4	5	4	4	31
12	5	5	5	5	5	5	5	35
13	4	5	4	4	4	4	4	29
14	4	4	4	4	4	4	4	28
15	4	4	4	4	4	4	4	28
16	4	5	5	5	5	5	5	34
17	4	4	4	4	4	4	4	28
18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	5	5	5	5	5	4	4	33
21	5	4	4	4	5	5	5	32
22	5	4	4	5	5	4	5	32
23	4	4	4	5	5	4	4	30
24	4	4	4	5	4	5	4	30
25	3	4	5	5	4	4	5	30
26	4	4	4	4	4	5	5	30
27	4	3	4	3	3	4	3	24
28	5	5	5	5	4	4	4	32
29	5	4	4	5	5	5	4	32
30	5	5	5	5	5	4	5	34

X2,1	X2,1	X2,3	X2,4	X2,5	JML	Y1	Y2	Y3
5	4	4	5	4	22	5	4	4
5	5	4	4	4	22	5	5	4
4	5	4	4	4	21	4	5	4
4	5	5	4	5	23	4	5	5
5	5	5	5	4	24	5	5	5
5	4	4	5	4	22	4	4	4
4	5	4	4	4	21	4	5	4
5	5	4	4	4	22	4	5	4
4	5	5	4	5	23	4	5	5
4	5	5	5	4	23	4	5	5
4	5	5	4	5	23	4	5	5
5	5	5	5	5	25	3	5	5
4	5	4	4	4	21	4	5	4
4	4	4	4	4	20	4	4	4
4	4	4	4	4	20	4	4	4
4	5	5	5	5	24	3	5	5
4	4	4	4	4	20	4	4	4
4	4	4	4	4	20	4	4	4
4	4	4	4	4	20	4	4	4
5	5	5	5	5	25	5	5	5
5	4	4	4	5	22	5	4	4
5	4	4	5	5	23	5	4	4
4	4	4	5	5	22	4	4	4
4	4	4	5	4	21	4	4	4
3	4	5	5	4	21	3	4	5
4	4	4	4	4	20	4	4	4
4	3	4	3	3	17	4	3	4
5	5	5	5	4	24	5	5	5
5	4	4	5	5	23	5	4	4
5	5	5	5	5	25	5	5	5

Y4	Y5	Y6	JML
5	4	5	27
4	4	4	26
4	4	5	26
4	5	5	28
5	4	4	28
5	4	5	26
4	4	4	25
4	4	5	26
4	5	5	28
5	4	4	27
4	5	4	27
5	5	5	28
4	4	4	25
4	4	4	24
4	4	4	24
5	5	5	28
4	4	4	24
4	4	4	24
4	4	4	24
5	5	4	29
4	5	5	27
5	5	4	27
5	5	4	26
5	4	5	26
5	4	4	25
4	4	5	25
3	3	4	21
5	4	4	28
5	5	5	28
5	5	4	29

5	4	4	5	4	5	27
5	5	4	4	4	4	26
4	5	4	4	4	5	26
4	5	5	4	5	5	28
5	5	5	5	4	4	28
4	4	4	5	4	5	26
4	5	4	4	4	4	25
4	5	4	4	4	5	26
4	5	5	4	5	5	28
4	5	5	5	4	4	27
4	5	5	4	5	4	27
3	5	5	5	5	5	28
4	5	4	4	4	4	25
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
3	5	5	5	5	5	28
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	4	29
5	4	4	4	5	5	27
5	4	4	5	5	4	27
4	4	4	5	5	4	26
4	4	4	5	4	5	26
3	4	5	5	4	4	25
4	4	4	4	4	5	25
4	3	4	3	3	4	21
5	5	5	5	4	4	28
5	4	4	5	5	5	28
5	5	5	5	5	4	29

## t Tabel

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

**Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)**

<b>df</b>	<b>Pr</b>	<b>0.25 0.50</b>	<b>0.10 0.20</b>	<b>0.05 0.10</b>	<b>0.025 0.050</b>	<b>0.01 0.02</b>	<b>0.005 0.010</b>	<b>0.001 0.002</b>
41		0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42		0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43		0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44		0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45		0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46		0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47		0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48		0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49		0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50		0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51		0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52		0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53		0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54		0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55		0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56		0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57		0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58		0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59		0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60		0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61		0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62		0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63		0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64		0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65		0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66		0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67		0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68		0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69		0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70		0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71		0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72		0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73		0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74		0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75		0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76		0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77		0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78		0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79		0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80		0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

**Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)**

<b>df</b>	<b>Pr</b>	<b>0.25 0.50</b>	<b>0.10 0.20</b>	<b>0.05 0.10</b>	<b>0.025 0.050</b>	<b>0.01 0.02</b>	<b>0.005 0.010</b>	<b>0.001 0.002</b>
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392	
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262	
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135	
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011	
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890	
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772	
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657	
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544	
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434	
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327	
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222	
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119	
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019	
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921	
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825	
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731	
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639	
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549	
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460	
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374	
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289	
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206	
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125	
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045	
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967	
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890	
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815	
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741	
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669	
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598	
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528	
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460	
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392	
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326	
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262	
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198	
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135	
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074	
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013	
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954	



## NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT

N	Taraf Signif		N	Taraf Signif		N	Taraf Signif	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	27	0.381	0.487	55	0.266	0.345
4	0.950	0.990	28	0.374	0.478	60	0.254	0.330
5	0.878	0.959	29	0.367	0.470	65	0.244	0.317
6	0.811	0.917	30	0.361	0.463	70	0.235	0.306
7	0.754	0.874	31	0.355	0.456	75	0.227	0.296
8	0.707	0.834	32	0.349	0.449	80	0.220	0.286
9	0.666	0.798	33	0.344	0.442	85	0.213	0.278
10	0.632	0.765	34	0.339	0.436	90	0.207	0.270
11	0.602	0.735	35	0.334	0.430	95	0.202	0.263
12	0.576	0.708	36	0.329	0.424	100	0.195	0.256
13	0.553	0.684	37	0.325	0.418	125	0.176	0.230
14	0.532	0.661	38	0.320	0.413	150	0.159	0.210
15	0.514	0.641	39	0.316	0.408	175	0.148	0.194
16	0.497	0.623	40	0.312	0.403	200	0.138	0.181
17	0.482	0.606	41	0.308	0.398	300	0.113	0.148
18	0.468	0.590	42	0.304	0.393	400	0.098	0.128
19	0.456	0.575	43	0.301	0.389	500	0.088	0.115
20	0.444	0.561	44	0.297	0.384	600	0.080	0.105
21	0.433	0.549	45	0.294	0.380	700	0.074	0.097
22	0.423	0.537	46	0.291	0.376	800	0.070	0.091
23	0.413	0.526	47	0.288	0.372	900	0.065	0.086
24	0.404	0.515	48	0.284	0.368	1000	0.062	0.081
25	0.396	0.505	49	0.281	0.364			
26	0.388	0.496	50	0.279	0.361			



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SRI ENA WASRINI, lahir di Togo-togo kec. Batang Kabupaten Jeneponto. Anak ketiga dari lima bersaudara yakni, Sri Eka Wahyuni, Sri Emi Warsukni, Sri Esi Warhamni, dan Sri Eli Wahdini dari pasangan Sainuddin dg Tompo dan Jumahari dg Kenna. Jenjang pendidikan yang diikuti mulai dari SDN 97 Batu Cidu

tamat pada tahun 2007, pada tahun yang sama melanjutkan ke tingkat SMP Negeri 1 Arungkeke yaitu tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Batang ditahun yang sama dan tamat pada tahun 2013.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ditingkat perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Akuntansi (S1) Di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyusun skripsi dengan judul : **“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG”**